



Vol 18 No 1, pp 10-19

AFFILIATION:

^{1,2,3}Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Uniwesitas
Wijayakusuma Puuwokerto

¹email:

sodikdwipurnomo@yahoo.com

²email: minadiw@gmail.com

³email: hersetfeb@gmail.com

***CORRESPONDENCE:**

sodikdwipurnomo@yahoo.com

THIS ARTICLE IS

AVAILABLE IN:

<http://mimb-unwiku.com/index.php/mimb>

ARTICLE HISTORY

Received:

Received:

01 April 2021

Reviewed:

15 April 2021

Revised:

20 April 2021

Accepted:

30 Mei 2021

HOW TO CITE:

Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis (MIMB)*, 18(1), 10-19.

Article Type: Research Paper

Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sodik Dwi Purnomo¹, Minadi Wijaya², Heri Setiawan³

ABSTRAK

Rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi pertama dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa pada tahun 2012 - 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh infrastruktur ekonomi, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan data panel dan pengolahan data menggunakan aplikasi *evIEWS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003 - 2018. Sementara itu, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003 - 2018. Implikasi dari penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur harus merata dan adil di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada daerah-daerah yang angka kemiskinannya tinggi.

Kata kunci: Infrastruktur Fisik, Kemiskinan

ABSTRACT

*The average poverty rate in the Special Province of Yogyakarta is the highest compared to other provinces in Java in 2012 to 2018. The study aims to analyze the impact of economic infrastructure, educational infrastructure and health infrastructure on poverty in the Special Region of Yogyakarta Province. Data analysis using multiple linear regression with panel data equations and data processing using the *evIEWS* application. The results showed that economic infrastructure had a significant negative effect on poverty in the Special Region of Yogyakarta Province in 2003 - 2018. Meanwhile, health infrastructure and education infrastructure had no effect on poverty in the Special Region of Yogyakarta Province in 2003 - 2018. The implication of this research is that infrastructure development must be equitable and fair in all districts and cities in the Special Region of Yogyakarta, especially in areas with high poverty rates.*

Keywords: Physical Infrastructure, Poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kesenjangan sosial yang kompleks di seluruh negara dengan melibatkan faktor-faktor yang saling berkaitan, antara lain: pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan (Todaro dan Smith, 2008: 18). Kompleksnya permasalahan kemiskinan membuat upaya pengentasan kemiskinan cukup sulit. Oleh karena itu, semua negara perlu membuat strategi dalam mengurangi dan mengentaskan jumlah penduduk miskin (Hassan *et al*, 2015).

Pengukuran kemiskinan di Indonesia ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS). Menurut BPS (2019) kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika penduduk miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pengukuran tersebut mengukur penduduk miskin pada sisi pengeluaran atau konsumsi dasar baik dari sisi makanan maupun non makanan yang diukur dalam satuan rupiah per individu. Dengan demikian, penduduk dikatakan miskin apabila rata-rata konsumsi di bawah garis kemiskinan. Berbeda halnya di *World Bank* (2016) yang menitikberatkan ukuran kemiskinan pada kemampuan daya beli masyarakat atau *Purchasing Power Parity* (PPP). Apabila pengeluaran atau konsumsi masyarakat per kapita di bawah US\$1,25 atau US\$2 per hari maka digolongkan dalam penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan, hal tersebut menunjukkan dampak positif dari program kemiskinan yang sudah diimplementasikan. Tetapi kenyataannya jumlah penduduk miskin masih tetap ada dan memberikan dampak yang negatif terhadap pembangunan nasional (Kriswandari, 2016). Menurut BPS (2018) jumlah penduduk miskin di Indonesia tersebar di 34 provinsi. Pulau Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia jika dibandingkan dengan pulau lainnya. Namun secara absolut Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Tabel 1 menunjukkan angka kemiskinan berdasarkan provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2012 sampai dengan 2018.

Tabel 1. Angka Kemiskinan Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012-2018 (%)

No	Provinsi	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	DIY	14,04	13,22	12,69	11,97	13,99
2	Jawa Tengah	13,45	13,23	12,62	11,26	13,61
3	Jawa Timur	12,31	11,95	11,48	10,92	11,98
4	Jawa Barat	9,55	8,86	8,27	7,35	8,99
5	Banten	5,83	5,39	5,52	5,25	5,57
6	DKI Jakarta	3,77	3,75	3,76	3,56	3,74

Sumber : BPS diolah, 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada periode tersebut Provinsi DIY menempati peringkat pertama dengan rata-rata angka penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa dan di posisi kedua Jawa Tengah dan pada urutan terbawah DKI Jakarta. Peneliti memilih Provinsi DIY sebagai lokasi penelitian, karena memiliki kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.

Menurut Faturochman dan Molo (1994) jauh sebelum era desentralisasi menyimpulkan bahwa karakteristik kemiskinan ekonomi di DIY berkaitan dengan kemiskinan lain seperti pendidikan, perumahan, dan akses terhadap informasi. Menurut Laporan Badan Perencanaan dan pembangunan Provinsi DIY tahun 2014 menjelaskan bahwa kemiskinan di Pulau Jawa bersumber pada keterbatasan sumberdaya, keterbatasan tanah, modal dan sempitnya kesempatan kerja yang bermuara hidupnya lingkaran setan. Lingkaran setan seperti ini mengakibatkan rendahnya pendapatan, seterusnya berakibat pada rendahnya tabungan dan investasi dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan dan

Purnomo ,Wijaya, & Setiawan
Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ketertinggalan. Lingkaran setan kemiskinan yang demikian menjadi tantangan bagi wilayah di DIY, khususnya di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo dimana sebagian besar dari tenaga kerja bergerak di sektor pertanian.

Kemiskinan juga memiliki hubungan yang erat dengan infrastruktur ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Infrastruktur jalan memiliki peranan terhadap pengurangan biaya produksi. Selain itu, pembangunan infrastruktur akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan akses terhadap lapangan pekerjaan, sehingga akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purnomo, 2019). Selain itu, infrastruktur dibangun dengan tujuan antara lain untuk mempermudah mobilitas orang, barang dan jasa, sehingga diharapkan dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan. Menurut Perkins, Fedderke, & Luis (2005) dan Seetanah, Ramessur, & Rojid (2009) pembangunan infrastruktur dibutuhkan oleh setiap negara guna menopang dunia usaha, sehingga peningkatan infrastruktur diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mampu mengurangi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Canning & Pedroni (1999), Raidi (2010), dan Prasetyo (2010) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur baik berupa sarana dan prasarana transportasi, jaringan listrik dan telekomunikasi serta pengadaan air bersih berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan nasional dan mengurangi kemiskinan.

Infrastruktur kesehatan juga berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut Suherman *et al.* (2018) infrastruktur kesehatan meliputi infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas kesehatan rumah sakit, puskesmas, dan mobil *ambulance*. Ketersediaan infrastruktur kesehatan pada dasarnya merupakan investasi sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Ridwan dan Setiawan, 2013). Kesehatan masyarakat akan berdampak pada produktivitas dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu kesehatan masyarakat memiliki keterkaitan dengan kemiskinan (Muhtarom, 2018). Selain itu, yang tidak kalah pentingnya dalam mengentaskan kemiskinan yaitu infrastruktur pendidikan. Menurut Brata (2010) infrastruktur pendidikan memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah, universitas, dan sumber daya pengajar yang berkualitas akan berdampak pada *human investment* yang mencakup pendidikan dan keterampilan yang merupakan elemen pokok dalam membangun masyarakat sejahtera (Rahayu, 2005). Dengan demikian, infrastruktur pendidikan merupakan upaya mengatasi masalah kemiskinan dengan meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan (Mahsunah, 2013).

Berdasarkan uraian di atas yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di Provinsi DIY menempati peringkat pertama di Pulau Jawa. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh infrastruktur ekonomi, infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2003-2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Menurut Arsyad (2004) kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi, hal tersebut mengandung makna bahwa kemiskinan meliputi banyak aspek dalam kehidupan. Terdapat dua aspek yang menjelaskan mengenai kemiskinan yaitu pertama aspek primer yang menjelaskan bahwa penduduk miskin disebabkan karena kekurangan asset, pengetahuan, keterampilan, dan organisasi sosia politik. Kedua, aspek sekunder yang menjelaskan penduduk miskin disebabkan karena sulitnya dalam mencari

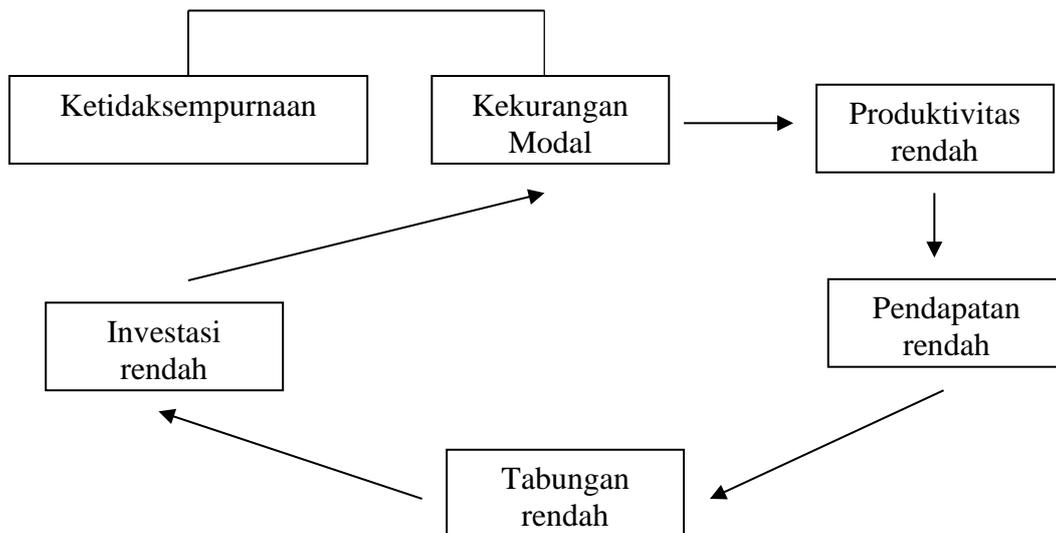
Purnomo ,Wijaya, & Setiawan
Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

sumber-sumber keuangan dan informasi serta jaringan sosial. Menurut Sumarto (2010) ada tiga penyebab kemiskinan yaitu:

1. Kondisi msasyarakat yang belum yang belum ikut serta dalam proses perubahan. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mempunyai kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi atau kualitas faktor produksi yang belum memadai, sehingga tidak menerima manfaat dari proses pembangunan yang sudah dilakukan;
2. Pembangunan yang direncanakan pemerintah pusat maupun daerah tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk ikut serta dalam proses berpartisipasi;
3. Faktor selanjutnya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat diperdesaan.

Shrap *et.al* dalam kuncoro (2003) mengidentifikasi tiga penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi yaitu:

1. Secara mikro kemiskinan disebabkan ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, sehingga menyebabkan distribusi yang menimpang;
2. Kemiskinan disebabkan akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia;
3. Kemiskinan muncul diakibatkan perbedaan dalam mengakses permodalan. Ketika kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi mengakibatkan pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berfikir ini dicetuskan oleh Rangnar Nurske pada tahun 1953 yang mengatakan bahwa : *a poor country is poor because it is poor* (negara miskin itu miskin karena miskin). Uraian tersebut dapat digambarkan oleh gambar sebagai berikut ini.



Sumber : Kuncoro, (2003)

Gambar 2. Lingkaran Kemiskinan (*The Vicious Circle of Proverty*)

Infrastruktur Fisik

Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain sebagainya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau strukturstruktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun

Purnomo ,Wijaya, & Setiawan
Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Posumah, 2015). Menurut Lewis dalam Posumah (2015) prasarana (*infrastructure*) bisa dengan aman mengikuti investasi yang lain. Sebagai contoh, jika investasi industri naik, akan terdapat penekanan akan penyediaan listrik dan fasilitas pengangkutan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas fasilitas umum harus memperhatikan naiknya kebutuhan, dan karena bisnis itu baik, tidak akan mendapat kesulitan dalam memperoleh dana untuk membiayai perluasan sistem.

Infrastruktur pembangunan pada dasarnya dapat dibagi menjadi menjadi dua, pertama infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (listrik, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, irigasi, drainase) dan sektor transportasi (jalan, kereta api, pelabuhan, lapangan terbang). Kedua, infrastruktur sosial yaitu prasarana sosial meliputi infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan.

Konsep infrastruktur memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut sudut pandang kepentingannya, belum terdapat kesamaan pandangan antar lembaga, negara dan antar disiplin ilmu mengenai konsep infrastruktur. Dari sisi ekonomi, infrastruktur dapat dipandang sebagai sumberdaya modal yang digunakan dalam aktivitas konsumsi, produksi dan investasi. Implikasi atas pengertian ini mendorong timbulnya klasifikasi infrastruktur menjadi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yaitu infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan (Kodoatie, 2003).

METEDO PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penilaian dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan (Sugiyono, 2013: 45). Berikut ini Tabel 2 yang menunjukkan defisini operasional dalam penelitian ini.

Tabel 2. Defisini Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Satuan
1	Kemiskinan	Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase
2	Infrastruktur ekonomi	Panjang jalan yang sudah terealisasi pembangunannya	Kilometer
3	Infrastruktur kesehatan	Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit yang sudah terealisasi pembangunannya	Unit
4	Infrastruktur pendidikan	Sekolah Dasar (SD) sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, dan perguruan tinggi yang sudah terealisasi pembangunannya	Unit

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model ekonometrika dengan metode regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Analisis regresi data panel adalah alat analisis regresi di mana data dikumpulkan secara individu (*cross section*) dan diikuti pada waktu

Purnomo ,Wijaya, & Setiawan
Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tertentu (*time series*). Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series* (Gujarati dan Porter, 2013). Berikut ini model penelitian ini dengan menggunakan pendekatan data panel:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 INFE_{1it} + \beta_2 INFK_{2it} + \beta_3 INFP_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

- Y = Angka kemiskinan diukur dalam satuan persentase
- α = Konstanta
- $\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi
- INFE = Infrastruktur ekonomi, diukur dalam satuan kilometer
- INFK = Infrastruktur kesehatan, diukur dalam satuan unit
- INFP = Infrastruktur pendidikan, diukur dalam satuan unit
- e = *Standard error*
- I = *Cross section* 5 kabupaten/kota
- t = *Time series* 2003-2018

Teknik analisis data panel dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan model *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*, sedangkan untuk menentukan model mana yang lebih sesuai dengan penelitian ini maka digunakan Uji Chow dan Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier* (Gujarati dan Porter, 2013). Uji asumsi klasik terhadap model regresi yang digunakan, dilakukan agar dapat mengetahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik atau tidak, model penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melalui uji kecocokan model dalam regresi data panel dengan menggunakan uji *chow* maka didapatkan *fixed effect model* dan sudah dinyatakan lolos asumsi klasik. Tabel 3 menunjukkan ringkasan hasil analisis regresi data panel *fixed effect model*.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

No.	Variabel Bebas	Koefisien Regresi	t_{hitung}	t_{tabel}	Prob.
1	Infrastruktur Ekonomi (X ₁)	-0,0335	-2,0856	-1,993	0,0414
2	Infrastruktur Pendidikan (X ₂)	-0,0097	-0,3319	-1,993	0,7411
3	Infrastruktur Kesehatan (X ₃)	-0,0027	-0,2983	-1,993	0,7665
Konstanta =		86,6119			
<i>Adj R² Square</i> =		,9739			
F_{hitung} =		235,8481			

Sumber: Output regresi

Pengaruh Infrastruktur Ekonomi terhadap Kemiskinan

Variabel infrastruktur ekonomi yang diukur dengan panjang jalan signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan ini sejalan dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa infrastrukturekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan infrastruktur dapat mempermudah dan memperlancar mobilisasi tenaga kerja, barang dan jasa, sehingga dapat membuka akses dalam mendapatkan pekerjaan dan membuka peluang bisnis baru (Purnomo, 2021). Temuan ini sejalan dengan Laabas & Limam (2004), Klasen (2005), Nuritasari (2013) dan Amalia & Madris, (2015) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap penduduk miskin. Hal tersebut didasarkan pada pembangunan infrastruktur berupa jalan akan berpengaruh

Purnomo ,Wijaya, & Setiawan
Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

terhadap mobilitas barang dan jasa, sehingga akan mempercepat proses produksi dan distribusi serta akan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan demikian akan mengurangi kemiskinan.

Infrastruktur jalan tidak hanya mendukung kegiatan produksi yang akan menciptakan keluaran dan peluang kerja, tetapi keberadaan infrastruktur juga mempengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi (Nuritasari, 2013). Infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi karena baik infrastruktur dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk bisnis dan masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksinya meningkat, pendapatan operasional meningkat, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat (Grigg, 1988). Ketersediaan infrastruktur juga mempercepat pemerataan pengembangan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan di antaranya daerah, sehingga mendorong investasi, baru pekerjaan, dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan demikian berkurang kemiskinan (Wahyuni, 2009).

Pengaruh Infrastruktur Pendidikan terhadap Kemiskinan

Infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa infrastruktur pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Infrastruktur kesehatan tidak signifikan terhadap kemiskinan dikarenakan pengaruh infrastruktur pendidikan tidak dapat berpengaruh langsung terhadap kemiskinan dengan kata lain dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melihat pengaruhnya terhadap kemiskinan. Selain itu juga dapat disebabkan karena tidak sesuainya antara kurikulum pendidikan yang diajarkan dengan kualifikasi atau keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sektor industri. Menurut Otabela dan Ndjoko (2020) penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan lebih memfokuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan primer (pangan) dari pada menempuh pendidikan, sehingga fasilitas pendidikan di negara Cameroon, belum dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, Franata *et al.* (2017) menjelaskan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan apabila mayoritas penduduk bekerja disektor informal yang tidak membutuhkan pendidikan yang pasti, sehingga walaupun level pendidikan meningkat, level pendapatan tidak meningkat terlalu banyak. Kondisi inilah yang mengidentifikasi bahwa masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan akan sulit untuk keluar dari kemiskinan tersebut (Purnomo, 2018).

Temuan ini tidak mendukung penelitian Dollar & Kraay (2001) Fan & Rao (2004), Laabas & Limam (2004) dan Klasen (2005) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur memiliki dampak dalam mengurangi angka kemiskinan. Temuannya menjelaskan bahwa pengeluaran untuk infrastruktur memiliki dua efek. Efek langsung muncul dalam bentuk manfaat yang diterima dari pengeluaran pada program kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Efek tidak langsung muncul ketika investasi pemerintah di bidang infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian, kesehatan dan pendidikan masyarakat pedesaan merangsang pertumbuhan pertanian dan non pertanian yang mengarah ke pekerjaan yang lebih besar dan kesempatan memperoleh penghasilan bagi masyarakat miskin dan bahan makanan yang lebih murah.

Pengaruh Infrastruktur Kesehatan terhadap Kemiskinan

Infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menjelaskan bahwa variabel infrastruktur kesehatan yang diukur dari jumlah fasilitas kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun pembangunan infrastruktur kesehatan yang merata di Provinsi Daerah Istimewa

Purnomo ,Wijaya, & Setiawan
Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta dan semua elemen masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah dan terjangkau termasuk penduduk miskin, namun jika penduduk miskin tidak memiliki keterampilan, modal usaha, dan jiwa berwirausaha maka sulit untuk keluar dari kemiskinan. Temuann Marhaeni *et al.* (2019) ketersediaan infrastruktur kesehatan dalam kondisi memadai, akan tetapi jika penduduk sangat miskin, maka penduduk miskin tidak mampu keluar dari kemiskinan karena penghasilan orang miskin rata-rata digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masalah utama bagi orang miskin. Selain itu temuan Fithri & Kaluge (2017) menjelaskan bahwa pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut dikarenakan tidak selarasnya peningkatan kesehatan masyarakat dengan jumlah lapangan pekerjaan yang baru, sehingga akan menciptakan angka kelahiran yang tinggi dan akan berdampak terhadap penambahan jumlah penduduk miskin.

Temuan ini tidak sejalan dengan Wibowo (2011), Yandrizal *et al.* (2014) dan Amalia & Madris (2015) pembangunan dan keberadaan infrastruktur kesehatan memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut, dikarenakan pengembangan infrastruktur kesehatan, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana dengan sumber daya manusia yang berkualitas tingkat kesejahteraan juga akan meningkat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN

Infrastruktur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2003- 2018. Sementara itu, infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2003 - 2018. Temuan ini mengimplikasikan pembangunan infrastruktur harus merata dan adil di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada daerah-daerah yang angka kemiskinannya tinggi agar pembangunan infrastruktur dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia R, dan Madris, R. R. A. (2015). The Effects of the Government Spending on the Poverty in West Sulawesi Province. *Jurnal Analisis*. 4(2): 183-189.
- Arsyad, L. (2014). *Konsep dan Pengukuran Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Pembangunan. Edisi Kedua*. UPP STIM. Yogyakarta: YKPN.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019). *Presentase penduduk miskin di Indonesai tahun 2012-2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia
- Brata, A. G. (2010). *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: LPUAJ.
- Canning, D & Pedroni, P. (1999). *Infrastructure and Long Run Economic Growth*. World Bank and USAID CAER II Working Paper
- Faturochman, F., & Molo, M. (1994). *Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Populasi*, 5(1), 1994.
- Fithri, N., & Kalague, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi Pemangunan*, 15(2): 129-136.
- Franata, J., Marwa, T., Yusuf, M, K. (2017). Factors affecting poverty level in south sumatra, Indonesia. *Sriwijaya International Journal of dynamic economics and Business (SIJDEB)* 1(1).119-132. DOI: <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v1i1.119-132>

Purnomo ,Wijaya, & Setiawan
Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- Grigg, N. (1988). *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley & Sons Australia, Limited.
- Gujarati, D N. & Porter, D, C. (2013). *Basic Econometrica*. Fifth Edition. New York : Mc Graw Hill.
- Hassan, S. A., Zaman, K., & Gul, S. (2015). The Relationship Between Growth- Inequality- Poverty Triangle and Environmental Degradation: Unveiling the Reality. *Arab Economic and Business Journal*, 10(1): 57-71. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aebj.2014.05.007>
- Khandker, S. R., & Faruqee, R. R. (2003). The Impact of Farm Credit in Pakistan. *Agricultural Economics*, 28(3): 197–213. doi:10.1111/j.1574-0862.2003.tb00138.x
- Kodoatie, R. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kriswandari, E. (2018). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan dan Pemetaan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Bantul Tahun 2011 Dan 2015. *Tesis*. FEB UGM.
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Laabas & Limam. (2004). *Impact of Public Policies on Poverty, Income Distribution and Growth*. Arab Planning Institute.
- Mahsunah, D. (2013). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. 1(3): 1-17.
- Marhaeni A. A. I. N., Sudibia I. K., Yuliarmi, N. Y. (2019). The Effect Of Economic Opportunities, Availability Of Infrastructure, Positive Culture, And Capital Accumulation On Depth / Poverty Gap In Bali Province, Indonesia. *RJOAS*. 3(87). 57-67. DOI: 10.18551/rjoas.2019-03.08
- Muhtarom, A. (2018). Kualitas Pendidikan Sebagai Motor Pengerak Perekonomian Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekbis*, 14(2): 712-721. DOI: <http://dx.doi.org/10.30736%2Fekbis.v14i2.123>
- Nuritasari, F. (2013). Pengaruh Infrastruktur, PMDN dan PMA terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4): 456-467. DOI: <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.3213>
- Otabela, N. N., Ndjobo, P.M.N. (2020). Analysis of the Impact of Education on Poverty in Cameroon: An Application of the Nested Logit Model. *Global Journal of Management and Business Research: B Economics and Commerce*. 20(6). 31-38.
- Posumah, F. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, 15(3): 1-13.
- Prasetyo, R. B. (2010). Dampak Pembangunan Infrastruktur dan Aglomerasi Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Tesis*. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Perkins, P., Fedderke, J., & Luiz, J. (2005). An Analysis of Economic Infrastructure Investment in South Africa. *South African Journal Of Economics*. 73(2): 211-228. DOI: 10.1111/j.1813-6982.2005.00014.x
- Purnomo, S. D. (2018). Determinants of Income of Poor Women-Headed Households in Madiun City. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 13(2), 19-31. <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2018.13.2.1152>

Purnomo ,Wijaya, & Setiawan
Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- Purnomo, S. D. (2019). Determinant Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1), 47-58. DOI: 10.24235/amwal.v11i1.4171
- Purnomo, S. D. (2021). Analysis of Labor Absorption in Central Java Province. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 240-244. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.311>
- Rahayu, A. (2005). Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 9(2):78-90.
- Seetanah, B., Ramessur, S., Rojid, S. (2009). Does Infrastructure Alleviates Poverty In Developing Countries?. *International Journal Of Applied Econometrics And Quantitative Studies*. 6(2): 18-36.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, S., Musaiyadi, M., & Mukaromah, D. H. (2018). Peranan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam Peningkatan Kualitas Penduduk. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 8(2): 72-85. DOI: <https://doi.org/10.30741/wiga.v8i2.320>
- Todaro, M. P. (2008). *Pembangunan Ekonomi* (Jilid 1) (Edisi 9). Edisi Kesembilan Terjemahan Oleh Haris Munandar Dan Puji AL. Jakarta: Erlangga.
- World Bank. (2016). *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia* (ikhtisar). Jakarta: The World Bank Office Jakarta.
- Yandrizal, Y., Suryani, D., Anita, B., & Febriawati, H. (2014). Analysis of the Availability of Health Facilities and Equitable Service for The Implementation of National Health Insurance In the City Of Bengkulu, District Seluma and District Kaur. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 3(2): 103-112. DOI: <https://doi.org/10.22146/jkki.36383>
- Ridwan, Y, H & Setiawan, R, P. (2013). Penilaian Tingkat Keberlanjutan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan sebagai Daerah Tertinggal. *Jurnal Teknik Pomits*, 2(1): 1-5.